



PENILAIAN LAYAK INVESTASI DI INDONESIA

Achmad Wirabrata*)

Abstrak

Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia mendapatkan predikat layak investasi atau *investment grade* dari lembaga pemeringkat internasional *Standard & Poor's (S&P)* pada bulan Mei 2017, setelah sebelumnya mendapatkan predikat yang sama dari *Moody's Investors Services*, *Japan Credit Rating Agency Ltd (JCRA)*, dan *Fitch Ratings*. Kondisi tersebut dapat dijadikan stimulus masuknya dana internasional yang selama ini masuk ke negara-negara dengan peringkat tersebut. Masuknya investor ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik dan terkoneksi dapat menekan biaya logistik yang selama ini menjadi faktor tingginya harga produk sehingga dapat meningkatkan angka konsumsi rumah tangga. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya saing negara. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan dapat memberikan masukan dalam mendorong kinerja investasi yang mendukung program percepatan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

Pendahuluan

Pada akhir bulan Mei 2017 Indonesia mendapatkan predikat layak investasi atau *investment grade* dari lembaga pemeringkat internasional *Standard & Poor's (S&P)*. Sebelumnya Indonesia juga telah mendapatkan predikat yang sama dari *Moody's Investors Services*, *Japan Credit Rating Agency Ltd (JCRA)*, dan *Fitch Ratings*. Kondisi tersebut dapat dijadikan stimulus masuknya dana internasional yang selama ini masuk ke negara-negara dengan peringkat tersebut. Harapannya investasi yang masuk dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 pada kisaran 5,4 persen sampai dengan 6,1 persen. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan target pertumbuhan realistis ada pada angka 5,6 persen, dikarenakan kondisi perekonomian dunia yang belum stabil. Menurut Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh empat sektor utama, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja produktif, dan ekspor.

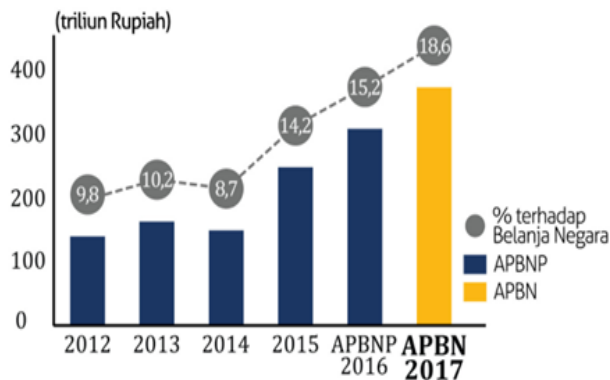
Konsumsi rumah tangga tahun 2017 mengalami penurunan dikarenakan inflasi, yang menyebabkan daya beli masyarakat

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: achmad.wirabrata@dpr.go.id



rendah. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,93 persen atau merupakan yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Menurut Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga dijaga pada kisaran 5,4 persen, melalui peningkatan kesempatan kerja, menjaga inflasi yang lebih rendah, dan dukungan belanja sosial. Konsumsi rumah tangga penting untuk terus dijaga pertumbuhannya karena berkontribusi sekitar 57 persen terhadap PDB. Menurut ekonom Indef Bhima Yudistira, tingginya harga disebabkan masih rendahnya kinerja infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, sehingga perlu peningkatan belanja produktif, terutama di sektor infrastruktur.

Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong peningkatan perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya anggaran infrastruktur dalam APBN. Pada Tahun 2017 anggaran infrastruktur sebesar 18,6 persen terhadap belanja negara atau senilai Rp387,7 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 15,22 persen dibanding tahun 2016 yang hanya Rp317,1 triliun.



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

Gambar 1. Anggaran Infrastruktur

Gambar 1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya anggaran yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur selalu meningkat. Kenyataannya, kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang baik dan terkoneksi sangat tinggi. Peningkatan anggaran infrastruktur pada APBN belum dapat menutup besarnya kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kerja sama baik *government to government* maupun *government to business* terus dilakukan pemerintah

untuk meningkatkan kinerja investasi. Ketersediaan infrastruktur dengan kinerja yang baik merupakan salah satu syarat masuknya investor. Presiden Joko Widodo menyatakan peningkatan kinerja investasi bisa memberi pengaruh positif pada peningkatan infrastruktur. Untuk itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai pentingnya penilaian investasi Indonesia dan dampak terhadap pembangunan infrastruktur.

Penilaian Layak Investasi Indonesia

Lembaga pemeringkat Internasional, *Standard & Poor's* (S&P), telah menaikkan *sovereign credit rating* (peringkat surat utang) Indonesia menjadi layak investasi atau *investment grade*. Sebelum ini, Indonesia telah lebih dulu mendapatkan penilaian positif terhadap utang dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yaitu *Moody's Investors Services*, *Japan Credit Rating Agency Ltd* (JCRA), dan *Fitch Ratings*. Penilaian ini diharapkan dapat membuka jalan terhadap datangnya investor. Dalam sejarah, Indonesia pernah meraih status *investment grade* dari S&P pada saat sebelum krisis 1998. Indonesia meraih status *investment grade* pertama kali dari S&P pada pertengahan 1992, baru kemudian disusul *Moody's* pada Maret 1994 dan *Fitch* pada Juni 1997 yang memberikan peringkat serupa. Pemerintah dapat merespons positif adanya keadaan ini dan menjadikan stimulus untuk mendorong perekonomian.

Atas keluarnya penilaian layak investasi di Indonesia ini, JCRA memandang bahwa penilaian ini dilatarbelakangi oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didukung oleh dua faktor. *Pertama*, perbaikan iklim investasi yang didorong oleh serangkaian Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sejak September 2015. *Kedua*, terkendalinya utang luar negeri swasta sebagai dampak dari kebijakan Bank Indonesia pada utang eksternal yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Selain itu, *Fitch* berpendapat bahwa faktor kunci yang mendukung perbaikan *outlook sovereign credit rating* Indonesia antara lain *pertama*, jejak rekam stabilitas makro ekonomi yang dapat dijaga baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di

tengah tantangan ekonomi global. *Kedua*, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia (BI) telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan. *Ketiga*, dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Pencapaian *investment grade* merupakan bentuk pengakuan terhadap kokohnya fundamental ekonomi makro Indonesia yang berhasil dibangun pemerintah selama beberapa tahun terakhir ini. Sementara menurut Deputy Gubernur BI, Perry Warjito, terdapat lima indikator yang dijadikan prasyarat yaitu indikator fundamental ekonomi, moneter dan keuangan, ketahanan fiskal, ketahanan eksternal, dan kemampuan institusional.

Pencapaian *investment grade* dapat menjadi pendorong masuknya investor ke Indonesia, karena selama ini kepercayaan pasar terhadap iklim investasi di Indonesia masih kurang baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat ada potensi dana global sekitar 700 miliar dolar Amerika yang selama ini mengalir ke negara dengan peringkat investasi yang baik dari keempat lembaga tersebut yang dapat masuk ke Indonesia. Sementara itu *Chief Economist SIGC* menyatakan bahwa terdapat kemungkinan ke depan akan lebih banyak dana asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini bisa menjadi modal dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pengakuan atas membaiknya iklim investasi di Indonesia dari ketiga lembaga pemeringkat internasional saat ini dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian. Kenaikan peringkat kelayakan investasi di Indonesia diharapkan dapat mendorong masuknya investor untuk berinvestasi di Indonesia, terutama pada sektor infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Prospek Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.

Infrastruktur diartikan sebagai layanan utama dari suatu negara yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi dengan menyediakan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.

Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat. Tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi. Dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Ekonom Universitas Padjajaran Kodrat Wibowo, infrastruktur dalam jangka menengah dan panjang dapat membantu mendorong konsumsi. Sementara Ekonom Universitas Airlangga Rudi Purwono berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah untuk tercapainya Indonesia yang berdaya saing tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur di Indonesia masih sangat kurang, terutama untuk dapat meningkatkan mobilitas masyarakat antardaerah dan untuk menurunkan biaya logistik yang selalu menjadi permasalahan. Menyadari hal tersebut maka saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai program konektivitas nasional. Sayangnya, sebagaimana disampaikan pada bagian pendahuluan, untuk mewujudkan rencana pembangunan tersebut anggaran APBN belum dapat menutupi kebutuhan pembiayaan.

Seiring dengan adanya pencapaian *investment grade* yang dikeluarkan lembaga pemeringkat internasional, maka peluang masuknya investor ke Indonesia akan meningkat. Dan diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu fokus pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Tujuan akhir dari pembangunan infrastruktur ini adalah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini Pemerintah juga mulai aktif menawarkan kerja sama dengan pihak asing, antara lain kerja sama pembangunan infrastruktur yang ditawarkan untuk dibiayai oleh asing seperti 65 bendungan dengan perkiraan memerlukan dana Rp79 triliun. Sementara itu, pemerintah juga telah menerima kerja sama dengan operator pelabuhan asal Belanda, yaitu *Port of Rotterdam* dalam meningkatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuala Tanjung di Provinsi Bangka Belitung. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyatakan kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan peran pelabuhan sehingga dapat menurunkan biaya logistik serta menjadi contoh pelabuhan lain di Indonesia.

Penutup

Pencapaian Indonesia mendapatkan *investment grade* bukanlah hal yang mudah. Untuk itu pemerintah harus terus berusaha menjaga peringkat tersebut. Pengakuan terhadap kondisi layak investasi di Indonesia oleh empat lembaga pemeringkat internasional dapat memudahkan Indonesia dalam menawarkan kerja sama pembangunan sektor riil seperti infrastruktur sebagai belanja produktif. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas antardaerah, sehingga dapat menurunkan biaya logistik. Kondisi infrastruktur yang baik merupakan salah satu pendorong bertambahnya investor yang datang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, DPR perlu mendukung dan mendorong pemerintah untuk dapat memanfaatkan penilaian layak investasi tersebut seoptimal mungkin untuk mengundang para investor agar dapat turut serta merealisasikan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan. DPR juga harus melakukan fungsi pengawasan agar implementasi kebijakan percepatan pembangunan tersebut sesuai dengan aturan dan dapat mencapai hasil yang optimal.

Referensi

- “Asing Bisa Berpartisipasi”, *Kompas*, 5 Juni 2017, hlm. 20.
- “Bank Dunia Sepakati Pendanaan 100 Juta Dollar AS untuk Infrastruktur Indonesia”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/14/135029026/bank.dunia.sepakati.pendanaan.100.juta.dollar.as.untuk.infrastruktur.indonesia>, diakses 6 Juni 2017.
- “Jokowi Genjot Pembangunan Infrastruktur”, *Suara Pembaruan*, 6 Juni 2017, hlm. 3.
- “Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen di 2018”, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170404221710-78-204985/pemerintah-patok-pertumbuhan-ekonomi-56-persen-di-2018/>, diakses 6 Juni 2017.
- “Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/Pengaruh%20Infrastruktur%20Terhadap%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia.pdf>, diakses 6 Juni 2017.
- “Perekonomian Indonesia dan APBN 2017”, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses 5 Juni 2017.
- “Perekonomian RI Masih Menjanjikan”, *Bisnis Indonesia*, 5 Juni 2017, hlm. 1.